

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Pasifik Selatan merupakan sebuah kawasan yang dihuni oleh negara-negara, populasi yang kecil, dan tidak stabil dalam kondisi politiknya¹. Namun, disisi lain kawasan Pasifik Selatan memiliki potensi yang cukup menjanjikan yang berasal dari sumber daya alam yang melimpah. Sehingga, kawasan ini juga menjadi ajang perebutan pengaruh dari negara-negara besar seperti Amerika dan China yang berlomba-lomba menggapai hati negara kawasan ini dengan berbagai macam cara seperti bantuan luar negeri. Hal ini dilakukan oleh negara-negara tersebut selain melihat potensi yang ada di Pasifik Selatan, Amerika Serikat dan China juga memiliki kepentingan-kepentingan lainnya yang menjadikan Pasifik sebagai arena kontestasi antara Amerika Serikat dan China.

Pasifik Selatan dianggap sebagai perpanjangan wilayah pengaruh AS di Samudra Pasifik, penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan melawan pengaruh China dan memastikan kebebasan navigasi di jalur perdagangan utama². Wilayah ini mencakup jalur-jalur pelayaran utama yang menghubungkan Asia dan Amerika, menjadikannya sebagai koridor penting dalam perdagangan dan mobilisasi militer. Secara historis, China telah memiliki hubungan dengan kawasan

¹ Siti Nadjiha, PERSAINGAN CHINA-AUSTRALIA DALAM PEREBUTAN PENGARUH DI KAWASAN PASIFIK, Vol, 4, No, 1, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, hal. 34.

² Deasifa Aqmarina & Anggun Puspitasari, Strategi Perimbangan Amerika Serikat di Asia Pasifik terhadap Tiongkok melalui Kebijakan Ekonomi Pada Periode 2017 – 2019, BALCONY, Vol. 5, No. 1, Hal. 32.

ini melalui komunitas etnis Tionghoa yang sudah lama tinggal dan berdagang di sana. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, keterlibatan China di Pasifik Selatan telah meningkat secara signifikan dalam bentuk perdagangan, bantuan, dan aktivitas komersial lainnya³. Program Belt and Road Initiative (BRI) China juga telah diperluas ke kawasan ini, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur maritim yang dapat meningkatkan konektivitas dan integrasi ekonomi dengan Asia Timur.

China memandang Pasifik Selatan sebagai wilayah di mana ia dapat menantang dominasi tradisional Amerika Serikat dan sekutunya, serta memperluas pengaruhnya melalui kerja sama militer, bantuan keamanan, dan pembangunan infrastruktur militer di negara-negara kepulauan⁴. Adanya hal tersebut menjadikan negara-negara kawasan Pasifik Selatan berpotensi mengalami adanya ancaman yang diakibatkan konflik antara China sebagai penantang dominasi tradisional seperti Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat juga memperkuat pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan serta melakukan berbagai upaya untuk mencegah pengaruh China menyebar lebih luas lagi.

Upaya China untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan sendiri didukung oleh akan kayanya sumber daya alam serta sumber daya manusia yang melimpah dari China. Dengan adanya hal tersebut ambisi untuk menyebarkan

³ Mulyadi Trisakti & M. Syaprin Zahidi, Kepentingan China Meningkatkan Intensitas Kerjasama di Kawasan Pasifik Selatan, IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies, Vol. 4, No. 2, Hal. 17.

⁴ Michael O'Keefe, The Militarisation of China in the Pacific: Stepping Up to a New Cold War?, Security Challenge, Vol. 16, No. 1, Hal. 106-108.

pengaruh China di berbagai sektor inti dalam interaksinya di dunia internasional seperti pertahanan, keamanan, ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya semakin gencar dilakukan oleh China⁵. Pengaruh China di Pasifik Selatan sendiri berkembang cukup pesat yang dapat dilihat dari berbagai bantuan luar negeri yang diberikan China kepada negara dikawasan terutama yang memiliki hubungan diplomatik dengannya. Hal ini dikarenakan bantuan luar negeri yang diberikan China sifatnya tidak mengikat dan syarat yang diberikan oleh China untuk mendapatkan bantuan tersebut juga lunak, atas dasar itulah negara-negara di kawasan Pasifik Selatan tertarik untuk menjalin hubungan diplomatik dengan China dan menerima bantuan dari China dengan senang hati terutama bagi negara kawasan yang memiliki penghasilan nasional dibawah rata-rata.

Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Pasifik Selatan menilai bahwa China merupakan ancaman yang akan memudarkan pengaruh Amerika di Pasifik Selatan. Amerika Serikat juga tidak begitu saja membiarkan negara-negara lain untuk menyebarkan pengaruhnya lebih banyak lagi di kawasan Pasifik Selatan. AS membuat sebuah aliansi dengan nama *Partners in the Blue Pacific* (PBP) bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan diplomasi dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik dan dunia luar. Aliansi ini sendiri terdiri dari AS, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris. Selain itu terdapat aliansi lain yang disebut QUAD atau Dialog Keamanan Segi Empat (*The*

⁵ Thesalonika Yulyanti, dkk. STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DI TENGAH POTENSI KONFLIK ASIA PASIFIK: AUKUS (AUSTRALIA, INGGRIS, DAN AMERIKA SERIKAT) VS REPUBLIK RAKYAT CHINA, Vol, 7, No, 2, Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Hal. 129.

Quadrilateral Security Dialogue) yang ada sejak 2004 sebagai kemitraan longgar untuk bantuan kemanusiaan dan mempercepat pemulihan India yang terdampak tsunami pada tahun itu⁶. Selain itu, AS yang sebelumnya menggunakan kebijakan *US Central Command* menjadi *US Indo Pasific Command*. Perubahan pemusatan kekuatan militer AS ini juga sebagai tindakan membendung adanya negara-negara lain seperti China.

Beberapa bentuk kontestasi yang terjadi di Pasifik Selatan sendiri seperti adanya inisiatif *Belt Road Initiative* (BRI) atau sebelumnya disebut *The One Belt One Road* (OBOR) yang digagas oleh China. Dengan inisiatif ini China mencoba untuk melebarkan dan mendominasi pengaruhnya di kawasan Pasifik. Strategi BRI ini menjadi salah satu usaha China untuk mensukseskan klaim China atas Laut China Selatan (LCS) yang berdasar kepada sejarah China juga menjadi salah satu faktor hadirnya China di Pasifik Selatan. Mengingat adanya klaim LCS ini juga mencakup area kawasan Pasifik. Peta dari BRI secara tidak langsung menunjukkan bahwa China berupaya untuk melakukan dominasi khususnya kawasan Asia-Pasifik. Mengingat ambisi besar China, Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki pengaruh di dunia terkhusus di kawasan Pasifik merespons hal tersebut sebagai ancaman, karena inisiatif ini pasti akan melemahkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik⁷. Amerika Serikat merespon hal itu dengan

⁶ Dionisius Reynaldo Triwibowo dan Muhammad Samsul Hadi, AS Bentuk Aliansi Baru untuk Tangkis Pengaruh China di Kepulauan Pasifik, diakses dalam <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/06/25/as-bentuk-alian-si-baru-untuk-tangkis-pengaruh-china-di-kepulauan-pasifik> (8/4/2023, 05.00)

⁷ Rizky, *Op. Cit* hal. 131.

mengeluarkan kebijakan "*Asia-Pacific Rebalancing*" pada masa pemerintahan Obama dan istilah strategi "Indo-Pasifik" pada masa pemerintahan Donald Trump. Kedua hal tersebut dilakukan Amerika Serikat untuk menekan dan menyeimbangi perluasan pengaruh China terkhusus di Pasifik⁸.

Bentuk kontestasi lainnya adalah dimana Papua Nugini sebagai negara yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur karena kurangnya listrik dan infrakstruktur global dalam telekomunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut Papua Nugini menjalin hubungan kerjasama dengan China melalui perusahaan teknologi seperti Huawei yang akan membuat jaringan telekomunikasi di Papua Nugini. Australia sebagai sekutu Amerika Serikat merespon hal ini dengan menawarkan untuk membiayai proyek jaringan di Papua Nugini. Mengingat bantuan yang diberikan China lebih besar maka Papua Nugini memilih untuk tetap melakukan kerjasama dengan China dibandingkan dengan melakukan kerjasama dengan Australia⁹.

Banyaknya bantuan dan penyebaran pengaruh China di Pasifik Selatan ini menjadikan China memiliki julukan baru sebagai *banker* baru di kawasan¹⁰. Pengaruh China yang semakin meluas dan meningkat secara intens tentu akan mengancam pengaruh yang telah dibangun lama oleh negara besar seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat juga mendorong Australia sebagai pendonor dana terbesar

⁸ I Gusti Agung Ayu Usha M, Perebutan Pengaruh Antara Amerika Serikat dan China di Asia Pasifik, dalam Sigit and V. L. Sinta Herindrasti (Ed). *Geopolitics and International Contemporary Issues in Asia Pacific and Beyond*, Jakarta: UKI Press.

⁹ Elka, S. Wie Lawa, Upaya Amerika Serikat Dalam Membendung Pengaruh China di Papua Nugini, dalam Sigit and V. L. Sinta Herindrasti (Ed). *Geopolitics and International Contemporary Issues in Asia Pacific and Beyond*, Jakarta: UKI Press.

¹⁰ Nadjiha, *Op. Cit* hal. 34.

dan merupakan negara yang memiliki pengaruh telah lama di kawasan Pasifik Selatan untuk kembali meningkatkan peran dan pengaruhnya di kawasan¹¹. China telah banyak melakukan pendekatan dengan negara-negara yang ada di Pasifik Selatan beberapa tahun terakhir.

Dampak dari adanya kontestasi bantuan luar negeri antara Amerika Serikat dan China ini berpengaruh kepada konstelasi politik negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dalam dukungan diplomatik, Kiribati yang telah mengalihkan dukungan diplomatiknya dari Taiwan ke China karena pemimpin Kiribati saat itu melihat China sebagai salah satu negara yang lebih menguntungkan daripada Taiwan. Taiwan sendiri merupakan salah satu aliansi militer utama Amerika Serikat¹². Selain itu, Kepulauan Solomon juga menjadi salah satu negara yang mengubah arah dukungan diplomatiknya dari Taiwan menuju China. Alasan Kepulauan Solomon mengalihkan dukungan diplomatiknya sendiri karena China dinilai dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan Kepulauan Solomon dengan syarat yang lebih lunak dan jumlah yang besar dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Taiwan¹³.

Penulis melihat bahwa masuknya China di kawasan Pasifik Selatan yang melakukan kontestasi politik dengan Amerika Serikat memiliki pola yang hampir

¹¹ Pablo Bustelo, China's Emergence: Threat or 'Peaceful Rise'?, Elcano Royal Institute, diakses dalam <https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/chinas-emergence-threat-or-peaceful-rise/> (12/03/2023, 21.22 WIB)

¹² Mulyadi Trisakti dan M. Syaprin Zahidi, Kepentingan Nasional Kiribati Dalam Memusutkan Hubungan Diplomatik Dengan Taiwan dan Beralih ke China, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol, 4, No, 5, Riau: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

¹³ Adinda Normala Putri, Persaingan Pengaruh di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok, Jurnal Asia Pacific Studies, Vol, 3, No, 2, July 2019, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.

sama dengan polaritas yang terjadi pada masa perang dingin, dimana dunia dikuasai oleh dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berusaha menyebarkan pengaruh dan ideologinya. Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa China dan Amerika Serikat memiliki pola yang sama dengan hal tersebut namun dalam skala yang lebih kecil yaitu kawasan. Dampak dari adanya kontestasi ini akan mempengaruhi adanya sistem regional yang ada di Pasifik Selatan terutama dalam perubahan konstelasi yang ada di kawasan Pasifik Selatan. Oleh karena itu penulis, tertarik untuk melihat bagaimana kontestasi politik dari China dan Amerika Serikat yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan melalui bantuan luar negeri akan mempengaruhi konstelasi politik kawasan yang ada. Sehingga, Penulis melakukan penelitian dengan judul *Dampak Kontestasi Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat dan China Terhadap Konstelasi Politik di Kawasan Pasifik Selatan* untuk meninjau lebih jauh dampak dari adanya kontestasi politik China dan Amerika Serikat melalui bantuan luar negeri yang ada di Pasifik Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis dampak dari kontestasi bantuan luar negeri Amerika Serikat dan China dalam memperkuat pengaruhnya di Kawasan Pasifik Selatan. Dengan demikian didapatkan pertanyaan berupa **Bagaimana dampak dari kontestasi bantuan luar negeri Amerika Serikat dan China di Kawasan Pasifik Selatan?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan dari penelitian ini **Untuk mengetahui bagaimana konstelasi politik yang terjadi di Kawasan Pasifik Selatan yang diakibatkan kontestasi bantuan luar negeri dari Amerika Serikat dan China di Kawasan Pasifik Selatan.**

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis dengan menambah wawasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam kajian disiplin ilmu hubungan internasional terkhusus dalam kajian kawasan Pasifik Selatan. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti lanjut untuk mengkaji sektor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian yang berjudul Dampak Kontestasi Politik Amerika Serikat dan China Melalui Bantuan Luar Negeri Terhadap Konstelasi Politik di Kawasan Pasifik Selatan.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat lain yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah adanya manfaat praktis. Manfaat praktis yang dimaksudkan adalah memperluas wawasan bagi pembaca terkhusus pengkaji kawasan Pasifik Selatan tentang adanya kontestasi politik melalui bantuan luar negeri di kawasan Pasifik sebagai salah satu instrumen memperkuat pengaruh Amerika Serikat dan China. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan insight baru bagi pembaca yang awam akan kawasan Pasifik Selatan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Setiap penelitian dan kajian ilmiah tidak dapat dipisahkan dari keterkaitannya dengan penelitian terdahulu. Hal tersebut disebabkan penelitian terdahulu menjadi sebuah pembanding dengan kajian baru yang akan dilakukan di masa mendatang. Dari pernyataan tersebut, penelitian mengenai adanya Interaksi antara Amerika Serikat dan China di wilayah Pasifik telah menjadi salah satu fenomena yang menarik perhatian banyak akademisi hubungan internasional, khususnya mereka yang berfokus pada dinamika politik internasional di kawasan Pasifik.. Untuk memberikan pembanding dan gambaran mengenai fenomena yang ada pada penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Joanne Wallis, dalam jurnalnya yang berjudul *“How Should Australia Respond to China’s Increased Presence in the Pacific Islands?”*, mengkaji berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Australia terkait dengan meningkatnya kehadiran China di kawasan Kepulauan Pasifik. Artikel ini menyoroti pentingnya kawasan Pasifik bagi kepentingan strategis kedua negara, di mana aktivitas China di wilayah tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi ekspansi globalnya. Penelitian tersebut menggarisbawahi sejumlah risiko yang mungkin muncul dari keterlibatan China, termasuk potensi berkurangnya pengaruh dan nilai-nilai Australia di kawasan itu, risiko beban utang yang tidak berkelanjutan, serta dampak lingkungan negatif yang dapat terjadi akibat proyek-proyek infrastruktur yang digagas oleh China.

Artikel ini menggunakan **metodologi kualitatif** dengan memanfaatkan analisis literatur dan dokumen kebijakan yang relevan, serta wawancara dengan pembuat kebijakan dan pakar di bidang terkait. Kerangka teori yang digunakan berfokus pada konsep keamanan regional serta peran norma dan nilai dalam membentuk dinamika hubungan internasional. Dalam penutupnya, peneliti merekomendasikan agar Australia mengambil langkah yang lebih proaktif dan terkoordinasi dalam menjalin keterlibatan dengan kawasan Pasifik. Upaya ini meliputi penguatan hubungan yang telah terjalin dengan negara-negara Kepulauan Pasifik, serta mendukung pengembangan institusi dan norma di wilayah tersebut. Peneliti juga menekankan pentingnya investasi jangka panjang dalam proyek infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, dengan memastikan bahwa inisiatif-inisiatif tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan kepentingan strategis Australia¹⁴.

Matthew Dornan dan Jonathan Pryke, dalam jurnal mereka yang berjudul *“Foreign Aid to the Pacific: Trends and Developments in the Twenty-First Century”*, menganalisis tren dan perubahan dalam pemberian bantuan luar negeri ke kawasan Pasifik pada abad ke-21. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah negara donor utama, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, China, dan Jepang, serta mengevaluasi dinamika kebijakan bantuan mereka dari masa ke masa. Selain itu, penelitian ini mengulas berbagai bentuk bantuan yang

¹⁴ Joanne Wallis, How Should Australia Respond to China’s Increased Presence in the Pacific Islands?, *Security Challenges*, Vol, 16, No, 3, 2020, diakses dalam <https://www.jstor.org/stable/26924339> (1/4/2023 13.21 WIB)

disalurkan, termasuk bantuan untuk pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan bantuan tanggap bencana, dengan menyoroti peran strategis bantuan tersebut dalam mendukung kebutuhan kawasan Pasifik.

Dornan menggunakan pendekatan campuran dengan menggabungkan **metode kuantitatif dan kualitatif** dalam penelitiannya. Data kuantitatif diambil dari berbagai sumber terpercaya, seperti OECD, World Bank, dan sumber lainnya, untuk menganalisis tren serta pola bantuan ke kawasan Pasifik. Di sisi lain, analisis kualitatif dilakukan melalui telaah dokumen kebijakan bantuan dan sumber relevan lainnya guna memahami motivasi serta prioritas yang mendasari kebijakan para donor utama. Pendekatan ini memungkinkan Dornan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang dinamika bantuan luar negeri di kawasan tersebut.

Dornan mendasarkan analisisnya pada teori-teori **tentang bantuan dan pembangunan internasional**, dengan menyoroti perdebatan mengenai efektivitas bantuan dalam mendorong hasil pembangunan. Ia juga mengeksplorasi dimensi geopolitik dari bantuan, termasuk kompetisi antara kekuatan besar untuk memperluas pengaruh di kawasan Pasifik. Hasil analisisnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam bantuan asing ke kawasan Pasifik selama abad ke-21, dengan China menjadi salah satu donor utama dalam beberapa tahun terakhir. Dornan mencatat adanya diversifikasi dalam aliran bantuan, yang kini lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan investasi strategis lainnya. Namun, ia juga menggarisbawahi sejumlah tantangan, seperti isu tata kelola yang buruk dan korupsi, yang dapat menghambat efektivitas bantuan di wilayah tersebut.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan artikel "*Foreign Aid to the Pacific: Trends and Developments in the Twenty-First Century*" oleh Dornan terletak pada fokus kajiannya. Artikel Dornan membahas secara umum tren dan perkembangan aliran bantuan luar negeri di kawasan Pasifik, mencakup berbagai donor utama tanpa mendalami dampak spesifiknya terhadap dinamika geopolitik. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi dampak kontestasi bantuan terhadap perubahan konstelasi pengaruh di kawasan Pasifik. Selain itu, sementara Dornan memberikan analisis yang luas tentang berbagai donor, penelitian ini lebih terfokus pada perbandingan peran dan strategi Amerika Serikat serta Cina dalam memberikan bantuan di wilayah tersebut¹⁵.

Jian Yang dan Joanne Wallis, dalam jurnal mereka yang berjudul "*China and the Emerging Regional Order in the South Pacific*," menyebutkan bahwa keterlibatan China di Pasifik Selatan didorong oleh tujuan ekonomi dan strategis. Tujuan ini meliputi upaya mengamankan akses ke sumber daya alam, memperluas pengaruhnya di kawasan, serta menghadapi dominasi Amerika Serikat. Artikel ini juga membahas berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari kehadiran China di wilayah tersebut. Di antara tantangan yang diidentifikasi adalah persaingan dengan kekuatan tradisional, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta dampaknya terhadap stabilitas regional. Di sisi lain, artikel ini juga menyoroti

¹⁵ Matthew Dorman and Jonathan Pryke, *Foreign Aid to the Pacific: Trends and Developments in the Twenty-First Century*, Asia & Pacific Policy Studies, Vol. 4, No. 3, Australia: Australian National University.

peluang yang dapat dimanfaatkan, terutama melalui bantuan dan investasi yang dapat mendorong pembangunan kawasan.

Penelitian Jian Yang dan Joanne Wallis menggunakan sumber sekunder seperti **dokumen pemerintah, laporan media, dan literatur akademik** untuk menganalisis kebijakan serta aktivitas China di Pasifik Selatan. Artikel ini memberikan tinjauan historis keterlibatan China di kawasan, dimulai dari hubungan diplomatik awal dengan negara-negara Kepulauan Pasifik hingga inisiatif strategis terkini seperti *Belt and Road Initiative*. Dengan mengacu pada **teori regionalisme dan politic great power**, para peneliti menganalisis dampak kehadiran China terhadap tatanan hegemonik tradisional. Mereka berpendapat bahwa pengaruh China yang semakin besar menantang dominasi tradisional di kawasan tersebut dan mendorong terbentuknya tatanan regional baru yang didasarkan pada dinamika kekuatan yang lebih kompleks dengan banyak aktor.

Peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan China membawa dampak positif dan negatif sekaligus, menciptakan tantangan dan peluang bagi stabilitas serta pembangunan kawasan. Sebagai rekomendasi, mereka menyarankan aktor regional, termasuk Australia dan Selandia Baru, untuk terlibat secara konstruktif dengan China guna mengelola pengaruhnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong kerja sama dalam menangani tantangan bersama, seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun kedua artikel tersebut membahas keterlibatan China di Pasifik Selatan, masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap topik ini. Artikel "*China and the Emerging Regional Order in the South Pacific*" memberikan

tinjauan menyeluruh tentang kebijakan dan aktivitas China di kawasan, dengan fokus pada implikasi tatanan kawasan yang muncul serta dinamika geopolitik. Sebaliknya, penelitian “*Analisis Dampak Kontestasi Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat dan China Terhadap Konstelasi Politik di Kawasan Pasifik Selatan*” secara khusus mengeksplorasi dampak kontestasi bantuan asing terhadap pengaruh politik regional. Penelitian ini juga memberikan analisis komparatif antara program bantuan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dan China, menyoroti bagaimana persaingan tersebut memengaruhi konstelasi politik di kawasan Pasifik¹⁶.

E. Cassity, dalam jurnalnya yang berjudul “*Cast the Net a Little Wider: Australian Aid in the South Pacific*,” membahas program bantuan Australia di Pasifik Selatan dengan menggali konteks sejarah, alasan di balik komitmen awal, dan evolusi kebijakan bantuan dari waktu ke waktu. Artikel ini mengeksplorasi berbagai bentuk bantuan yang telah diberikan Australia, seperti bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan teknis, serta bagaimana bantuan tersebut disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik masing-masing negara di kawasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, termasuk laporan pemerintah, literatur akademik, dan wawancara dengan pejabat serta penerima bantuan, meskipun artikel ini juga mencatat tantangan dalam menilai dampak bantuan melalui pendekatan tersebut. Dengan kerangka teoritis dari **studi**

¹⁶Yongjin Zhang, China and the emerging regional order in the South Pacific, Australian Journal of International Affairs, Vol, 61, No, 3, 2007, diakses dalam doi: 10.1080/10357710701531537 (3/4/2023 23.11 WIB)

konstruktivisme, artikel ini mengevaluasi keefektifan bantuan Australia, seperti kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan tata kelola dan institusi lokal di Pasifik Selatan.

Hasil penelitian memberikan gambaran tentang dampak bantuan Australia, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan program yang dijalankan. Artikel ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas bantuan, seperti stabilitas politik, tingkat korupsi, dan kapasitas lembaga lokal. Perbedaan antara artikel ini dan “*Analisis Dampak Kontestasi Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat dan China Terhadap Kawasan Pasifik Selatan*” terletak pada cakupan dan fokusnya. Penelitian Cassity menawarkan analisis mendalam tentang program dan kebijakan bantuan spesifik Australia, dengan penekanan pada dampak langsung terhadap masyarakat di Pasifik Selatan. Sementara itu, penelitian tentang kontestasi bantuan AS dan China mengambil pendekatan komparatif yang lebih luas, mengeksplorasi bagaimana persaingan antara kedua negara ini memengaruhi konstelasi politik di kawasan tersebut¹⁷.

Penelitian kelima mengacu pada buku berjudul “*Maritime and Territorial Disputes in the South China Sea*” yang ditulis oleh **Nalanda Roy** dan diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini membahas beragam sengketa di Laut China Selatan serta dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Dari segi metodologi, buku ini memanfaatkan berbagai sumber, termasuk catatan sejarah, dokumen hukum,

¹⁷ Elizabeth Cassity, Cast the net a little wider: Australian aid in the South Pacific, *International Journal of Education Development*, Vol, 28, No, 3, 2008, diakses dalam <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2006.12.003> (25/3/2023 18.54 WIB)

serta wawancara dengan pakar dan pembuat kebijakan. Penulis juga mengadopsi sejumlah kerangka teoritis untuk menganalisis akar permasalahan sengketa dan strategi yang digunakan oleh berbagai pihak dalam mengamankan kepentingan masing-masing. Struktur buku ini terbagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing menyoroti aspek spesifik dari konflik di Laut China Selatan. Sebagai contoh, ada bagian yang membahas latar belakang historis sengketa, sementara bagian lainnya fokus pada aspek hukum dan diplomasi yang melingkupi konflik tersebut. Hasil analisis dalam buku ini memberikan pandangan komprehensif tentang berbagai sengketa yang terjadi, lengkap dengan dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas regional.

Selain itu, buku ini mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh berbagai pihak, termasuk China, Amerika Serikat, dan ASEAN, untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan memengaruhi dinamika sengketa. Buku ini relevan untuk mendukung penelitian bertema “Analisis Dampak Kontestasi Bantuan Luar Negeri di Amerika Serikat dan China untuk Memperkuat Pengaruhnya di Kawasan Pasifik Selatan.” Dengan fokus pada ketegangan geopolitik dan dampaknya terhadap keamanan kawasan, buku ini secara khusus menganalisis peran negara-negara besar seperti AS dan China di kawasan Asia-Pasifik melalui pendekatan historis, hukum, dan diplomatik. Buku ini juga menawarkan perspektif yang luas tentang strategi yang diterapkan oleh berbagai aktor dalam mencapai tujuan mereka di kawasan tersebut¹⁸.

¹⁸ Nalanda Roy, 2016, *South China Sea Disputes : Past, Present, and Future*, Lexington Books/Fortress Academic

Pada artikel berjudul "*Burden-sharing: the US, Australia and New Zealand alliances in the Pacific islands*" karya **Joanne Wallis dan Anna Powles**.

Artikel ini mengeksplorasi pembagian beban dan tanggung jawab antara Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru dalam memberikan bantuan keamanan dan pembangunan kepada negara-negara kepulauan Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode seperti kajian literatur, analisis dokumen kebijakan, dan wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan serta pakar di bidang terkait. Kerangka teoritis utama yang digunakan adalah teori pembagian beban, yang menekankan pada distribusi tanggung jawab di antara sekutu untuk mencapai tujuan bersama. Artikel ini membahas konteks historis aliansi ketiga negara di kawasan Pasifik, serta pendekatan berbeda yang mereka gunakan dalam memberikan bantuan pembangunan dan keamanan. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan dan peluang dalam menciptakan pembagian beban yang efektif di wilayah tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan dan kepentingan AS, Australia, dan Selandia Baru di kawasan Pasifik tidak sepenuhnya sejalan, yang menyebabkan variasi dalam pendekatan pembagian beban mereka. Artikel ini juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik antara sekutu untuk mencapai hasil yang lebih efektif¹⁹. Jika dibandingkan dengan penelitian "*Analisis Dampak Kontestasi Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat dan*

¹⁹ Joanne Wallis and Anna Powles, *Burden-sharing: the US, Australia and New Zealand alliances in the Pacific islands*, *International Affairs*, Vol, 97, No, 4, July 2021, diakses dalam <https://doi.org/10.1093/ia/iiab081> (24/3/2023 21.19 WIB)

China Terhadap Konstelasi Politik di Kawasan Pasifik Selatan”, artikel ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada dinamika internal antara AS, Australia, dan Selandia Baru dalam mengatur tanggung jawab mereka di kepulauan Pasifik. Artikel ini menawarkan analisis mendalam tentang strategi masing-masing negara, serta tantangan dan peluang dalam pembagian beban, sambil menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama di kawasan tersebut.

Penelitian ketujuh mengacu pada artikel berjudul *"Contested Concept: Unpacking Australia's Indo-Pacific Debate"* yang ditulis oleh **Brendan Taylor**. Artikel ini menganalisis konsep Indo-Pasifik sebagai kerangka baru dalam kebijakan luar negeri Australia, sekaligus mengeksplorasi perdebatan mengenai definisi dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif**, dengan menggunakan tinjauan mendalam terhadap literatur, dokumen kebijakan, serta wawancara dengan pembuat kebijakan dan ahli di bidang tersebut. Kerangka teoritis yang digunakan adalah pendekatan hubungan internasional dan analisis kebijakan luar negeri untuk mengevaluasi dampak politik dan strategis dari konsep Indo-Pasifik. Artikel ini membahas konteks historis kebijakan luar negeri Australia dan bagaimana konsep Indo-Pasifik muncul serta berkembang sebagai kerangka strategis baru. Penulis juga membahas tentang konsep kontestasi termasuk berbagai perdebatan mengenai definisi dan implikasinya terhadap keamanan kawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Indo-Pasifik mencerminkan pergeseran fokus strategis Australia ke arah kawasan Samudra Hindia, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap kebangkitan China dan dampaknya pada stabilitas regional. Namun, artikel ini juga melihat sejumlah tantangan,

termasuk kesulitan dalam mendefinisikan dan mengoperasionalkan konsep tersebut, serta adanya interpretasi yang berbeda dan persaingan kepentingan di antara kekuatan regional. Jika dibandingkan dengan penelitian “*Analisis Dampak Kontestasi Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat dan China Terhadap Konstelasi Politik di Kawasan Pasifik Selatan*”, artikel ini lebih fokus pada dinamika konsep Indo-Pasifik sebagai kerangka kebijakan strategis Australia dan implikasinya terhadap keamanan kawasan. Artikel ini memberikan analisis rinci mengenai sifat konseptual yang diperdebatkan, tantangan dalam implementasinya, serta bagaimana perbedaan interpretasi dapat menciptakan persaingan kepentingan di antara aktor-aktor regional²⁰.

Penelitian kedelapan berasal dari artikel berjudul “*Contestation and Transformation. Final Thoughts on the Liberal International*” karya **Riccardo Alcaro**. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi oleh negara dan kondisi sistem internasional yang liberal serta menyoroti kebutuhan akan transisi untuk menyesuaikan dengan dinamika lingkungan global yang terus berubah. Penelitian menggunakan **metode kualitatif** melalui kajian literatur dan analisis dokumen kebijakan untuk mengeksplorasi kerangka teoritis **liberalisme** dan perkembangannya secara historis.

Selain itu, artikel ini juga melihat tren dan peristiwa terkini dalam politik global untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi, seperti kebangkitan

²⁰ Brendan Taylor, Contested Concept: Unpacking Australia’s Indo-Pacific Debate, *Asian Politics and Policy*, Vol, 12, No, 1, 2020, diakses dalam <https://doi.org/10.1111/aspp.12512> (4/4/2023 13.18 WIB)

kekuatan non-liberal seperti China dan Rusia, serta polarisasi politik internal di negara-negara demokrasi liberal. Penulis berpendapat bahwa tatanan ini tidak bisa dipertahankan dalam bentuk status *quo*, tetapi memerlukan transformasi yang lebih bervariasi.

Hasil dari penelitian Alcaro abahwa transformasi tersebut dapat dilakukan dengan menekankan *multilateralisme*, kerja sama, dialog, serta pengakuan atas kebutuhan reformasi dan adaptasi untuk menghadapi tantangan global. Artikel ini menggambarkan visi tatanan internasional yang lebih fleksibel, yang mampu mengakomodasi keragaman kepentingan dan perspektif dalam sistem internasional. Dibandingkan dengan penelitian "*Analisis Dampak Kontestasi Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat dan China Terhadap Konstelasi Politik di Kawasan Pasifik Selatan*", yang berfokus pada persaingan antara negara besar dalam konteks bantuan luar negeri di Pasifik Selatan, artikel ini memiliki cakupan yang lebih luas. Artikel Alcaro menawarkan kerangka teoritis untuk memahami sifat tatanan internasional yang diperebutkan, tantangan yang dihadapinya, serta potensi transformasi dalam merespons perubahan dinamika global²¹.

Penelitian kesembilan adalah "*The Australian Identity, National Security, and the United States Alliance: Examining Australia's Idiosyncratic Foreign Policy*" oleh Willey dan Aaron. Penelitian ini membahas karakteristik unik kebijakan luar negeri Australia, khususnya dalam konteks aliansinya dengan

21

Riccardo Alcaro, Contestation and Transformation. Final Thoughts on the Liberal International Order, *International Spectator*, Vol, 53, No, 1, Januari 2018

Amerika Serikat, serta bagaimana identitas nasional dan isu-isu keamanan memengaruhi pembentukan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif** melalui analisis dokumen pemerintah, literatur akademik, sumber media, dan wawancara dengan pembuat kebijakan serta akademisi

Penelitian ini melihat bahwa kebijakan luar negeri Australia dibentuk oleh interaksi kompleks antara sejarah, geografi, budaya, dan kepentingan ekonomi. Peneliti berargumen bahwa hubungan erat Australia dengan Amerika Serikat bukan sekadar hasil dari tekanan eksternal, tetapi juga refleksi dari keyakinan yang mendalam tentang pentingnya aliansi tersebut dalam menjaga keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan luar negeri Australia kemungkinan besar akan bertahan di tengah perubahan dinamika global, adaptasi tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang baru dalam sistem internasional. Artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana Australia memadukan identitas nasional dengan hubungan strategisnya bersama Amerika Serikat²².

Jika dibandingkan dengan penelitian “*Analisis Dampak Kontestasi Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat dan China Terhadap Konstelasi Politik di Kawasan Pasifik Selatan*”, artikel ini menawarkan perspektif yang lebih luas terkait kebijakan luar negeri Australia secara keseluruhan, dengan fokus khusus pada hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat, sekaligus memberikan wawasan

²² Aaron James Willey, The Australian identity, national security and the United States alliance: examining Australia's idiosyncratic foreign policy, Thesis, Noragic: International Relations, Norwegian University of Life Sciences

praktis tentang bagaimana Australia dapat menavigasi tantangan dan peluang di lingkungan global yang terus berubah.

Penelitian kesepuluh merupakan artikel berjudul "*Foreign Aid in Australia's Relationship with the South: Institutional Narratives*" karya **Thomas W. D. Davis**. Artikel ini membahas kebijakan bantuan luar negeri Australia terhadap kawasan Pasifik Selatan dan Asia Tenggara, dengan menitikberatkan pada pendekatan negara dalam memberikan bantuan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data dari dokumen pemerintah, pidato, pernyataan kebijakan, serta wawancara dengan pejabat lembaga bantuan dan berbagai pemangku kepentingan.

Kerangka teori utama yang digunakan adalah *institusionalisme*, yang menyoroti bagaimana narasi lembaga diciptakan oleh aktor di dalam institusi untuk membenarkan posisi kebijakan tertentu. Hal ini tidak hanya mencerminkan kepentingan geopolitik Australia seperti upaya mempertahankan pengaruh di Pasifik Selatan dan Asia Tenggara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan ideologis. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan bantuan luar negeri Australia lebih dari sekadar alat pembangunan; itu adalah instrumen kebijakan luar negeri yang mencerminkan tujuan strategis Australia secara lebih luas.

Jika dibandingkan dengan penelitian "*Analisis Dampak Kontestasi Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat dan China Terhadap Konstelasi Politik di Kawasan Pasifik Selatan*", artikel ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada kebijakan bantuan luar negeri Australia terhadap Selatan. Sementara penelitian tentang AS

dan China mengambil pendekatan komparatif untuk menganalisis dampak bantuan asing terhadap pengaruh geopolitik mereka, artikel ini menyoroti peran narasi kelembagaan dalam membentuk kebijakan bantuan Australia. Perspektif ini memberikan wawasan baru tentang motivasi strategis dan dinamika internal yang memengaruhi kebijakan luar negeri Australia²³.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menyadari bahwa belum ada yang secara spesifik membahas tentang bantuan luar negeri dari negara-negara di luar kawasan Pasifik kepada negara-negara di wilayah tersebut, yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan ini. Selain itu, peneliti melihat bagaimana bantuan luar negeri yang menjadi ajang kontestasi oleh negara luar ini akan berdampak kepada perkembangan negara di kawasan itu sendiri seperti dalam keamanan, ekonomi, politik, hingga hubungan diplomatik. Oleh karena itu peneliti menggunakan judul “Dampak Kontestasi Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Dan China Terhadap Konstelasi Politik Di Kawasan Pasifik Selatan” sebagai respon atas hal tersebut.

Tabel 1. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1.	Joanne Wallis	“How Should Australia Respond to China’s Increased Presence in the Pacific Islands?”	Australia perlu mengambil pendekatan yang lebih proaktif dan terkoordinasi untuk keterlibatannya dengan kawasan Pasifik, membangun hubungan yang ada dengan negara-

²³ Thomas W. D. Davis, *Foreign Aid in Australia's Relationship with the South: Institutional Narratives*, Round Table, Vol, 100, No, 415, Agustus 2011, diakses dalam DOI: 10.1080/00358533.2011.595254 (8/4/2023 17.21 WIB)

			negara Kepulauan Pasifik dan bekerja untuk memperkuat lembaga dan norma kawasan.
2.	Matthew Dornan dan Jonathan Pryke	"Foreign Aid to the Pacific: Trends and Developments in the Twenty-First Century"	Bantuan asing ke kawasan Pasifik telah meningkat secara signifikan pada abad ke-21, dengan China muncul sebagai donor utama dalam beberapa tahun terakhir. Dornan mencatat bahwa aliran bantuan ke wilayah tersebut menjadi lebih beragam, dengan penekanan lebih besar pada infrastruktur dan investasi strategis lainnya.
3.	Jian Yang dan Joanne Wallis	"China and the Emerging Regional Order in the South Pacific."	Keterlibatan China di Pasifik Selatan cenderung memiliki efek positif dan negatif, dan menghadirkan tantangan dan peluang bagi stabilitas dan pembangunan kawasan.
4.	E Cassity	"Cast the net a little wider: Australian aid in the South Pacific"	Dampak bantuan Australia di Pasifik Selatan, termasuk keberhasilan dan kegagalan berbagai program bantuan serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan Australia, seperti stabilitas politik, korupsi, dan kapasitas lembaga lokal.
5.	Nalanda Roy	"Maritime and Territorial Disputes in the South China Sea"	Mengeksplorasi berbagai strategi yang diadopsi oleh berbagai aktor, termasuk China, AS, dan ASEAN, untuk mengejar kepentingan mereka dan mempengaruhi hasil dari perselisihan tersebut.

6.	Joanne Wallis dan Anna Powles	"Burden-sharing: the US, Australia and New Zealand alliances in the Pacific islands"	AS, Australia, dan Selandia Baru memiliki kemampuan dan kepentingan yang berbeda di wilayah tersebut, yang dapat mengarah pada pendekatan pembagian beban yang berbeda.
7.	Brendan Taylor	Contested Concept: Unpacking Australia's Indo-Pacific Debate"	Konsep Indo-Pasifik mencerminkan pergeseran fokus strategis Australia menuju kawasan Samudra Hindia dan mencerminkan kekhawatiran yang berkembang tentang kebangkitan China dan dampaknya terhadap keamanan kawasan. Namun, peneliti juga menyoroti tantangan dalam mendefinisikan dan mengoperasionalkan konsep tersebut, serta potensi interpretasi yang berbeda dan persaingan kepentingan di antara kekuatan regional
8.	Riccardo Alcaro	"Contestation and Transformation. Final Thoughts on the Liberal International"	Tatanan internasional liberal dapat diubah melalui penerapan pendekatan yang lebih inklusif dan pluralistik yang mengakui keragaman kepentingan dan perspektif dalam sistem internasional. Ini termasuk penekanan yang lebih besar pada multilateralisme, kerja sama, dan dialog, serta pengakuan akan perlunya reformasi dan adaptasi dalam menanggapi perubahan tantangan global.

9.	Willey dan Aaron	"The Australian identity, national security and the United States alliance: examining Australia's idiosyncratic foreign policy"	Kebijakan luar negeri istimewa Australia dibentuk oleh interaksi faktor yang kompleks, termasuk sejarah, geografi, budaya, dan kepentingan ekonominya. Peneliti berpendapat bahwa identitas nasional Australia terkait erat dengan hubungannya dengan Amerika Serikat, tetapi hubungan ini bukan sekadar produk tekanan atau paksaan dari luar. Sebaliknya, itu mencerminkan keyakinan yang tertanam kuat pada nilai aliansi untuk keamanan dan kemakmuran nasional Australia.
10.	Thomas W. D. Davis	"Foreign Aid in Australia's Relationship with the South: Institutional Narratives"	Narasi institusional diciptakan oleh aktor di dalam institusi untuk membenarkan posisi kebijakan tertentu, dan narasi ini dibentuk oleh faktor sejarah, budaya, dan ideologis. Secara keseluruhan, " <i>Foreign Aid in Australia's Relationship with the South: Institutional Narratives</i> " memberikan kontribusi yang berharga untuk memahami kebijakan bantuan luar negeri Australia terhadap Selatan.

1.5 Teori dan Konsep

1.5.1 Neo-Realisme

Neo-realisme atau juga dikenal dengan Realisme Strukturalis merupakan salah satu teori dalam hubungan internasional yang menekankan adanya kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh sistem internasional. Neo-Realisme sendiri merupakan bentuk kritik atas realisme klasik, Waltz menyebutkan bahwa kelemahan dari realisme klasik adalah pada fokus perhatiannya pada aspek yang tidak terduga²⁴. Oleh karena itu teori dalam politik internasional menurut Waltz seharusnya digunakan untuk dapat melihat secara terus-menerus, maka dalam konteks neo-realisme ini penekanan fokus perhatiannya adalah pada sistem internasional yang menekan aktor internasional untuk bertindak²⁵

Neo-Realisme menyebutkan bahwa sebuah negara berperan sebagai aktor utama dalam dinamika hubungan internasional. Sistem yang anarki menjadikan negara merebutkan kekuasaan bukan dari dalam manusia itu sendiri. Beberapa Asumsi dalam Neo-Realisme yang diungkapkan oleh Waltz mencakup *Organizing Principle*, *Functional Differentiation*, dan *Distribution of Capability*. Pertama, *Organizing Principle* mengacu pada pandangan Waltz bahwa sistem hukum dan kerjasama internasional selalu dibentuk dalam kondisi anarki, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur antar negara. *Kedua* yang dikemukakan oleh Waltz adalah *Functional Differentiation* dimana tidak adanya pembagian dalam kerjasama hubungan internasional. *Ketiga* adalah *Distribution of Capability*,

²⁴Waltz, Kenneth N, *The Origins of War in Neorealist Theory*, *The Journal of Interdisciplinary History*, Vol, 18, no. 4 (Spring, 1988), diakses dalam <https://doi.org/10.2307/204817>. (15/4/2023 14.52 WIB)

²⁵ Jhin J. Mearsheimer, *Structural Realism*, dalam Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith (Ed.), *International Relations Theories*, United Kingdom: Oxford University Press. Hal. 72.

konsep terakhir ini dijelaskan oleh Waltz dimana kedudukan negara dalam hubungan internasional adalah setara, namun yang menjadi pembeda adalah kapabilitas negara tersebut. Dalam konteks kepentingan, negara dengan kekuatan semakin kuat maka akan semakin besar pula potensinya dalam memenangkan kepentingan nasionalnya di wilayah dunia internasional²⁶.

Stephen M. Walt juga menyebutkan dalam artikel yang berjudul “*Alliance Formation and the Balance of World Power*” menyebutkan jika pemberian bantuan militer ataupun ekonomi akan membentuk sebuah aliansi antara negara pemberi bantuan dengan negara penerima bantuan melalui hipotesis bahwa pemberi bantuan akan menciptakan sebuah sekutu yang efektif, baik dengan menunjukkan niat baik, membangkitkan rasa terima kasih, atau membuat penerima bantuan menjadi bergantung kepada pemberi bantuan²⁷. Dengan adanya anggapan dari Walt tersebut maka bantuan militer dan ekonomi akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi pemberi bantuan terhadap penerima bantuan, sehingga dapat menjadi alat yang kuat dalam pembentukan aliansi.

Menurut Walt perilaku dalam aliansi suatu negara terbagi menjadi dua kategori, yaitu, *balancing* dan *bandwagoning*. Aliansi *balancing* sendiri merupakan suatu keadaan dimana aliansi antar negara satu dengan negara lain ditujukan untuk melawan ancaman yang ada. Maksudnya, negara-negara yang lemah akan bersatu untuk membuat aliansi yang ditujukan untuk melawan aggressor atau ancaman.

²⁶ Martin Griffiths. 2001. Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Murai Kencana. Hal. 66.

²⁷ Stephen M. Walt, Alliance Formation and the Balance of World Power, International Security, Vol. 9, No. 4, Hal. 27.

Yang kedua, adalah aliansi *bandwagoning* yang mana arti secara bahasa sendiri adalah “sejajar dengan bahaya”. Aliansi ini menunjukkan perilaku negara-negara yang lemah akan bergabung dan menjadi aliansi atau bersekutu dengan negara revisionis yang lebih kuat dengan tujuan untuk bisa *survive*. Dalam kategori aliansi ini, menunjukkan keinginannya secara tersirat untuk menginduksi perubahan secara sistematis dan atau perilaku mendestabilisasi.

Walt menekankan bahwa konsep pembentukan aliansi tersebut memfokuskan pada hipotesis persaingan *balancing* (membentuk aliansi melawan ancaman) dan *bandwagoning* (membentuk aliansi dengan ancaman). Dimana hal ini menjadi implikasi dari masing-masing hipotesis untuk kebijakan luar negeri pertahanan, serta pengaruh kesamaan ideologis, budaya dalam pembentukan aliansi. Walt juga menyebutkan bahwa adanya hipotesis tersebut menjadi alat ukur suatu negara untuk menciptakan aliansi atau proksi melalui bantuan militer dan ekonomi²⁸.

Dalam penelitian ini akan menggunakan pola aliansi dengan kategori *bandwagoning* untuk menjawab permasalahan yang terjadi di Kawasan Pasifik Selatan. *Bandwagoning* digunakan karena penulis melihat bahwa perilaku dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk bisa *survive* dengan adanya China yang merupakan salah satu negara terkuat yang ada di dunia saat ini Tengah mencoba memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut dan China mencoba untuk melemahkan adanya pengaruh Amerika Serikat pada saat yang sama di kawasan

²⁸ *Ibid*

Pasifik Selatan. Vanuatu dan Kepulauan Solomon sendiri juga telah mengalihkan dukungan diplomatiknya dari Taiwan sebagai salah satu aliansi terdekat Amerika Serikat menuju China, hal ini menunjukkan bahwa adanya pola *bandwagoning* dimana negara-negara tersebut bersatu dengan ancaman yang datang untuk bertahan dari adanya kontestasi ini dan mendapatkan *benefit* dari adanya hal tersebut.

Negara-negara yang memilih strategi *bandwagoning* dalam membentuk aliansi umumnya adalah negara yang membutuhkan bantuan dan tidak terlalu berfokus pada keuntungan besar dari aliansi tersebut. Dalam konteks ini, keuntungan yang diutamakan adalah *relative gains* atau keuntungan relatif, di mana negara lebih memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh dibandingkan dengan pihak lain dalam aliansi. Dalam konsep *bandwagoning*, negara-negara yang lemah cenderung dan merasa perlu untuk bersekutu dengan negara yang lebih kuat, meskipun negara kuat tersebut sebelumnya dianggap sebagai ancaman. Langkah ini dilakukan karena negara yang lebih kuat memiliki kemampuan untuk memaksakan kehendaknya dan menguasai sumber daya atau keuntungan yang diinginkan, sehingga negara lemah merasa lebih aman dengan berada di pihaknya daripada melawan.²⁹

Negara-negara kecil atau lemah akan melakukan *bandwagoning* ketika mendapat ancaman atau sedang dalam kondisi konflik yang lebih kuat. Oleh karena adanya hal ini maka pola dari *bandwagon* ini terjadi ketika suatu sistem

²⁹ Mearsheimer, *Op. Cit.*, Hal. 163.

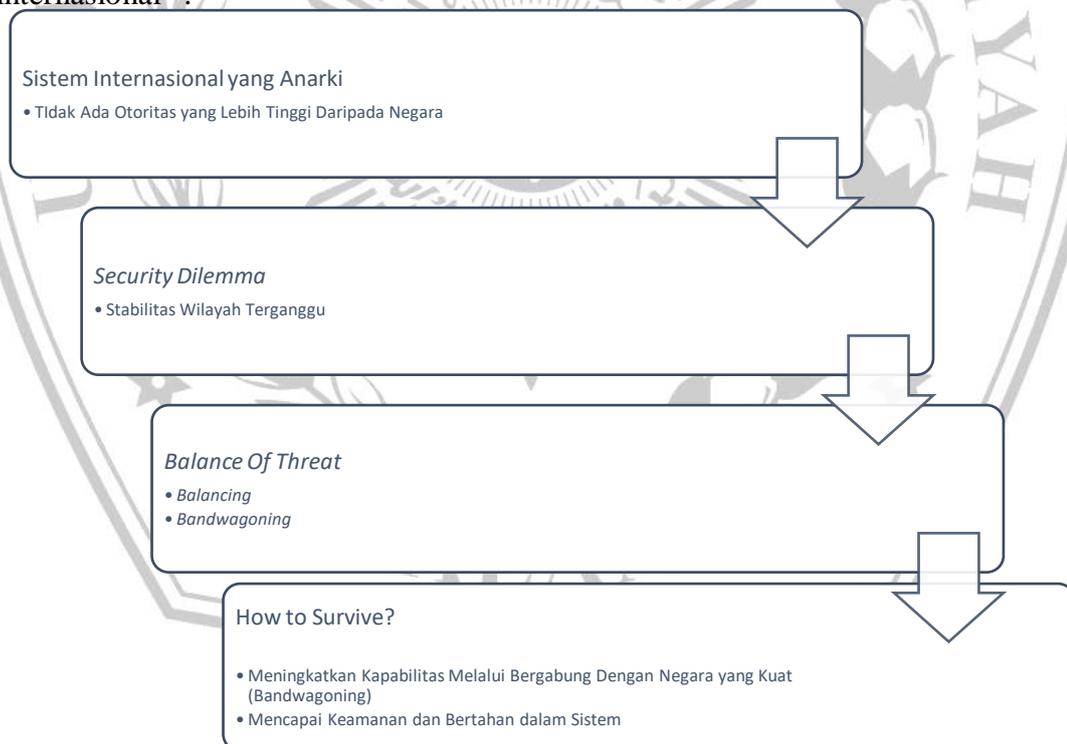
dalam sebuah keadaan tidak menentu. Dalam penelitian ini, hal tersebut terjadi ketika adanya China yang semakin menjadi salah satu negara *superpower* di dunia mulai masuk kedalam kawasan Pasifik Selatan. Negara-negara Pasifik Selatan yang merupakan mayoritas negara-negara kepulauan kecil yang masih membutuhkan adanya bantuan dan bergantung kepada negara-negara luar agar bisa *survive* menjadi sasaran yang baik bagi China untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan ini yang sebelumnya pengaruh dari Amerika Serikat di kawasan ini begitu kuat. Dalam konteks ini, China berupaya menawarkan pendekatan baru bagi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dengan memberikan bantuan luar negeri. Melalui strategi ini, China berharap dapat memenangkan hati negara-negara tersebut dan memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut.

Dinamika sebuah hubungan internasional sendiri ditentukan oleh negara *superpower* sebagai negara yang dominan³⁰. Adanya China sebagai salah satu negara *superpower* yang masuk menantang adanya dominasi Amerika Serikat yang telah lama dibangun menjadikan China *threat* baru bagi negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Sehingga, terjadi *security dilemma* terhadap negara-negara kawasan Pasifik Selatan ini yang mana ada beberapa negara yang akhirnya memutuskan untuk melakukan *bandwagoning* dengan China dengan tujuan untuk bisa *survive* dan mereka bahwa membentuk aliansi dengan China mendatangkan *relative gains* lebih baik daripada mengandalkan bantuan dan kerjasama yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya³¹.

³⁰ Mearsheimer, *Op. Cit.*, Hal. 79.

³¹ Mearsheimer, *Op. Cit.*, Hal. 79.

Para aktor dalam hubungan internasional, baik yang dominan maupun yang tidak, berinteraksi dalam sistem internasional yang bersifat anarki. Dalam konteks kawasan Pasifik, Amerika Serikat dan China berperan sebagai aktor dominan yang bersaing untuk memperluas pengaruh mereka. Negara-negara ini berinteraksi dengan sistem internasional dengan memberikan bantuan dan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik Selatan yang memiliki ketergantungan terhadap adanya bantuan dari luar sehingga hal ini juga dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dan China. Hal ini selaras dengan pandangan neorealisme dimana dalam sistem internasional yang anarkis maka akan dihadapkan dengan kebutuhan untuk *survival*, oleh karena itu diperlukan aktor *superpower* lebih dari satu dalam politik internasional³².



Gambar 1. 1 Alur Berpikir

³² Mearsheimer, *Op. Cit.*, Hal. 85.

1.5.2 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri adalah sebuah instrumen yang sering dimanfaatkan oleh negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya³³. Bantuan ini berfungsi sebagai alat diplomasi, propaganda, hingga dukungan untuk aksi militer, yang memungkinkan suatu negara mempengaruhi negara lain sesuai dengan kepentingannya. Meskipun dalam penerapannya terdapat motif atau alasan yang digunakan oleh negara pemberi bantuan luar negeri, namun dapat diambil garis besar bahwa kepentingan nasional suatu negara yang menjadikan negara pemberi bantuan luar negeri untuk memberikan bantuannya³⁴.

Dalam sejarahnya bantuan luar negeri merupakan sebuah bantuan yang telah diberikan dalam bentuk bantuan bilateral secara langsung oleh satu negara kepada negara lainnya. Pemberi bantuan juga secara tidak langsung juga melakukan bantuan multilateral jika sumber daya yang diberikan berasal dari beberapa negara pemberi atau pendonor lainnya. Dalam bantuan luar negeri yang berasal dari adanya kepentingan maka salah satu bentuk kebijakan luar negeri suatu negara dapat diutarakan dengan bentuk bantuan luar negeri.

Menurut Therien, pembangunan bantuan luar negeri dipengaruhi oleh pertarungan politik antara kekuatan konservatif dan kekuatan progresif. Dalam konteks bantuan luar negeri, terdapat dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif

³³ Sara Lengauer, *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method*, Culture Mandala: The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic Studies, Vol, 9, No 2, Article, 3, Australia: Bond University, hal. 35.

³⁴ Yusuf Rifaldy, *Melihat Latar Belakang Australia dalam Memberikan Bantuan Luar Negeri ke Kawasan Pasifik*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol, 13, No, 2, Surabaya: Universitas Airlangga, Hal. 188.

progresif dan perspektif konservatif. Perspektif progresif dalam bantuan luar negeri mencerminkan semangat egaliter dan kesetaraan internasional. Di dalam perspektif progresif juga dijelaskan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu, seperti fokus pada isu moral dan pengabaian terhadap kontribusi sektor swasta. Menurut perspektif progresif, bantuan luar negeri seharusnya mencerminkan kepentingan negara penerima³⁵.

Di sisi lain, dalam perspektif konservatif, definisi bantuan luar negeri lebih luas dan mencakup berbagai aspek. Konservatif menganggap bahwa bantuan pembangunan dapat digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri yang bermanfaat, seperti "*Stick and Carrot*" (penghargaan dan hukuman). Perspektif konservatif juga meyakini bahwa bantuan luar negeri adalah tindakan baik dari negara pemberi, bukan kewajiban moral. Konservatif menganggap bahwa bantuan luar negeri dapat menciptakan ketergantungan, sehingga bantuan harus dikurangi dan perdagangan harus lebih ditingkatkan. Perspektif progresif dan konservatif ini mempengaruhi pola bantuan luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara pemberi. Jika perspektif progresif mendorong bantuan dalam bentuk hibah program untuk memperkuat kapasitas yang langsung ditujukan kepada orang miskin, maka perspektif konservatif cenderung lebih condong pada bantuan berupa pinjaman untuk membangun infrastruktur seperti bendungan, jalan, atau bandara³⁶.

³⁵ Jean Phillippe Therien, *Debating Foreign Aid: Right Versus Left*, *Third World Quarterly*, Vol, 23, No, 3, Hal. 449.

³⁶ *Ibid.*

Manson menyebutkan bahwa dalam bantuan luar negeri merupakan instrument dari kebijakan luar negeri negara pemberi kepada negara penerima yang secara tidak langsung akan merujuk kepada program-program yang ditawarkan negara pemberi dengan mengedepankan kepentingan negara pemberi meskipun kepentingan dari negara penerima juga memiliki *value* yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Manson juga menyebutkan bahwa adanya kepentingan ekonomi dan letak geografis dalam mendistribusikan bantuan luar negeri suatu negara menjadi salah satu faktor negara pemberi mau memberikan bantuannya kepada negara penerima. Pendekatan ini memudahkan analisis kepentingan suatu negara penerima bantuan terhadap negara pemberi bantuan dengan menggunakan letak geografis sebagai indikator utama³⁷.

Maria Andersson menjelaskan dalam bantuan luar negeri memiliki motif untuk mendorong negara pemberi bantuan memberikan bantuannya kepada negara penerima. Maria juga menjelaskan secara keseluruhan terdapat tiga motif yang mendorong negara pemberi bantuan³⁸, yaitu:

1. Motif kemanusiaan

Dalam motif kemanusiaan ini tujuan adanya pemberian bantuan luar negeri adalah untuk mengurgai kemiskinan dan memperlihatkan kepedulian negara pemberi kepada negara penerima dan negara lain.

2. Motif Ekonomi

³⁷ Edward. S Manson, *Foreign Aid and Foreign Policy*, New York: Council of Foreign Policy, hal. 3-5.

³⁸ Andersson, Maria, 2009, *Motives behind the Allocation of Aid*. Göteborg: University of Gothenburg.

Motif ekonomi dapat dilihat dengan tiga indikator, *pertama* ketika sebuah negara pemberi memberikan bantuannya dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan negara pemberi dan penerima dalam pasar internasional. *Kedua* dalam motif ekonomi juga dapat dilihat ketika negara pemberi bantuan luar negeri memberikan bantuannya dengan adanya investasi yang diberikan oleh negara pemberi. *Ketiga* adalah adanya bantuan luar negeri yang mengedepankan kegiatan ekspor dan impor untuk memberikan peluang bagi negara pemberi dan penerima untuk meningkatkan perekonomian mereka.

3. Motif Sosial dan Politik

Dalam motif sosial dan politik ini setidaknya terdapat Sembilan indikator yang dapat mempengaruhi kondisi sosial dan politik negara pemberi dan penerima, indikator tersebut yaitu,

- a. Adanya ikatan atau *bonding* dimana tujuan dari bantuan luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara.
- b. *Embassies* dimana keberadaan embasi yang diperlukan untuk mewujudkan kepentingan negara yang memiliki embasi tersebut.
- c. Keamanan aliansi, dimana keamanan aliansi ini dapat dilihat ketika bantuan luar negeri yang diberikan memiliki tujuan untuk memperkuat keamanan terutama dalam bidang militer dari kedua negara.
- d. Perdamaian dan keamanan yang mana dalam perdamaian dan keamanan berbeda dengan keamanan yang mengedepankan sektor militer saja.
- e. Ideologi, dimana negara pemberi memiliki ideologi yang ingin dikenalkan atau disebarakan kepada negara lain.

- f. Demokrasi, indikator demokrasi ini dapat dilihat ketika negara penerima dengan menerima bantuan luar negeri terbebas dari adanya penindasan dan turunnya angka konflik yang terjadi.
- g. Hak Asasi Manusia, indikator HAM dapat dilihat ketika adanya negara yang melakukan pelanggaran HAM sehingga negara pemberi memberikan bantuannya kepada korban
- h. *Political Aims*, dimana ketika negara pemberi melakukan bantuan luar negerinya untuk tujuan politik negaranya.
- i. Pengakuan internasional, indikator ini menjelaskan bagaimana negara pemberi bantuan memberikan bantuannya kepada negara penerima dengan keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sehingga negara pemberi akan mendapatkan kesempatan untuk ikut andil dalam pembangunan dalam skala internasional. Selain itu, negara akan mendapatkan penghormatan dari negara lain dengan memberikan bantuan luar negerinya.

Adapun yang kontestasi yang dilakukan oleh China dan Amerika Serikat di Pasifik Selatan, penulis melihat dari prespektif motif ekonomi dan sosial politik. Motif tersebut diambil dikarenakan adanya keterkaitan antara motif pemberian bantuan luar negeri dengan asumsi teori Neo-Realisme oleh Walt. China dan Amerika Serikat yang menjadi aktor utama dalam penyebaran pengaruh di kawasan Pasifik dengan memberikan bantuan luar negeri untuk mendapatkan hati dari negara kawasan dengan tujuan kepentingan politik negaranya dengan salah satunya menggunakan bantuan luar negeri berbentuk investasi. Oleh karena itu,

penulis menganalisis penelitian ini dengan menggunakan konsep bantuan luar negeri, berdasarkan indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh Maria..

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatif kualitatif. Bungin menjelaskan bahwa penelitian eksplanatif adalah penelitian yang menjelaskan sebuah fenomena dengan pengaruh dari suatu variabel satu terhadap variabel lainnya³⁹. Penelitian eksplanatif sendiri juga dijelaskan sebagai instrumen untuk mencari hubungan sebab akibat dari variabel yang ada dalam penelitian dengan menggunakan teori dan konsep yang ada.

1.6.2 Tingkat Analisa

Untuk menjelaskan fenomena pada penelitian maka diperlukan level analisa yang tepat. Level analisa sendiri merupakan target dari objek analisa yang digunakan dalam penelitian yang mana akan membantu penulis untuk mendapatkan gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*), dan perkiraan (*prediction*) dari tindakan yang dilakukan oleh negara⁴⁰. Pada dasarnya level analisa terbagi menjadi tiga yaitu, negara-bangsa, sistem internasional, dan individu⁴¹. Pada penelitian ini, level analisa yang digunakan adalah hubungan antara sistem dengan sistem, dimana penjelasan tentang tindakan suatu negara dipengaruhi oleh sistem internasional⁴².

³⁹ Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 51.

⁴⁰ J. David Singer, The Level-of-Analysis Problem in International Relations, World politics Vol, 14, No, 1, United Kingdom: Cambridge University, Hal. 78-80

⁴¹ Yessi Olivia, Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional, Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1 (Juli 2013), Riau: Universitas Riau, Hal 898-899.

⁴² *Ibid.*

Dalam hal ini, level analisa sistem internasional diambil karena pada penelitian ini karena fenomena kontestasi bantuan luar negeri yang terjadi melibatkan hubungan antara negara dan bangsa yaitu Amerika Serikat dan China dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

1.6.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini berfokus tentang dampak dari adanya kontestasi bantuan luar negeri dari Amerika Serikat dan China untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan Pasifik Selatan. Untuk membantu penelitian ini maka ditentukan variabel penelitian yang disebut sebagai variabel *dependen* atau unit analisa dan variabel *independent* dimana Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat dan China sebagai unit eksplanasinya, dan Dampak dari kontestasi menjadi unit analisisnya. Oleh karena itu digunakan model *korelasionis* dimana tingkat unit eksplanasi dan analisisnya berada di tingkat yang sama yaitu *system to system*.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Materi

Dalam penelitian ini dibutuhkan pembatasan materi untuk mempermudah pembahasan dan berjalan sesuai konteks, maka penulis memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini mengenai bantuan luar negeri dalam bentuk bantuan ekonomi, militer dan keamanan oleh Amerika Serikat dan China yang diberikan di kawasan Pasifik sebagai salah satu instrumen mereka memperkuat pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan.

b. Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian yang digunakan penulis adalah bantuan luar negeri dan kerjasama ekonomi, militer dan keamanan yang diberikan Amerika Serikat dan China kepada negara kawasan Pasifik Selatan dalam kurun waktu 10 tahun kebelakang dari tahun 2013 atau 2013-2023. Hal ini diambil dikarenakan pada kurun waktu tersebut, bantuan luar negeri yang diberikan oleh China di kawasan Pasifik Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, adanya berbagai macam kebijakan Amerika Serikat pada kurun waktu tersebut yang mengindikasikan adanya komitmen Amerika Serikat di kawasan Pasifik Selatan semakin tinggi.

1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dan sarana pengumpulan data melalui metode *library research* dan studi literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menggali sumber data dari berbagai sumber yang dapat ditemukan melalui library research, seperti buku, jurnal internasional, skripsi, surat kabar, serta media elektronik seperti internet. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dan disusun oleh penulis dalam berbagai bab pembahasan sesuai dengan format dan konsep penulisan karya ilmiah untuk mencapai hasil penelitian yang diharapkan.

1.7 Hipotesa

Dari pemaparan yang telah disampaikan diatas didapatkan beberapa hipotesa. Dimana, bantuan luar negeri yang diberikan oleh Amerika Serikat dan China memiliki dampak terhadap konstelasi politik di Kawasan Pasifik Selatan. Amerika Serikat dan China merupakan aktor besar dalam hubungan internasional,

terutama di Kawasan Pasifik Selatan yang merupakan kawasan strategis dengan potensi ekonomi, geografi, sumber daya, dan keamanan yang besar. Bantuan yang diberikan oleh kedua negara tersebut dapat menjadi alat untuk memperkuat pengaruh politik, ekonomi, dan keamanan mereka di kawasan ini. Selain itu, persaingan antara Amerika Serikat dan China dalam memberikan bantuan luar negeri di kawasan Pasifik Selatan dapat memicu rivalitas dan ketegangan di antara kedua pihak. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut memiliki kepentingan strategis di Kawasan Pasifik Selatan dan bersaing untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan ini.

Hipotesis yang terakhir bahwa bantuan luar negeri yang disalurkan oleh Amerika Serikat dan China berpotensi memengaruhi dinamika kebijakan luar negeri serta diplomasi di wilayah Pasifik Selatan, khususnya terkait dengan kebijakan regional dan multilateral. Bantuan luar negeri dapat berfungsi sebagai alat dalam diplomasi dan strategi kebijakan luar negeri, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral, memengaruhi kebijakan di tingkat regional, serta meraih dukungan dalam forum-forum multilateral. Oleh karena itu, bantuan luar negeri dapat mempengaruhi dinamika kebijakan luar negeri dan diplomasi di Kawasan Pasifik Selatan.

Adanya konstelasi tersebut diakibatkan adanya kompleksitas dari hubungan negara-negara kawasan Pasifik Selatan seiring dengan perkembangan globalisasi. Dengan adanya perkembangan tersebut menyebabkan negara-negara lebih mementingkan keuntungan yang dapat dimaksimalkan dari negara pemberi bantuan daripada dengan negara yang telah lama menjadi pemegang kekuasaan di kawasan

tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga perilaku dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan terbilang cukup dinamis dengan melakukan *bandwagonig* cenderung lebih dekat dengan Amerika Serikat atau cenderung lebih dekat China, atau berperilaku *pragmatis dinamis* (memanfaatkan kontestasi kedua negara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar).

1.8 Struktur Penelitian

Di dalam sub bab ini, penulis menjabarkan bagian – bagian yang ada. Sehingga didapat struktur penulisan yang terbagi menjadi empat bab, yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Struktur Penelitian

BAB	ISI
BAB 1	<p>PENDAHULUAN</p> <p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p> 1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p> 1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p> 1.3.2.1 Manfaat Akademis</p> <p> 1.3.2.2 Manfaat Praktis</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Teori dan Konsep</p> <p> 1.5.1 Neo-Realisme</p> <p> 1.5.2 Bantuan Luar Negeri</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p> 1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p> 1.6.2 Tingkat Analisa</p> <p> 1.6.3 Variabel Penelitian</p> <p> 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p> 1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Hipotesa</p> <p>1.8 Struktur Penelitian</p>

BAB 2	KONTESTASI BANTUAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DAN CHINA DI PASIFIK SELATAN 2.1 Pasifik Selatan Dalam Perspektif Amerika Serikat dan China 2.1.1 Potensi Geografi dan Geopolitik Pasifik Selatan 2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam Pasifik Selatan 2.1.3 Potensi Ekonomi Pasifik Selatan 2.1.4 Potensi Keamanan dan Militer Pasifik Selatan 2.2 Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan China di Pasifik Selatan 2.3 Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat dan China di Pasifik Selatan 2.4 Kontestasi Bantuan Luar Negeri China dan Amerika Serikat di Kawasan Pasifik Selatan
BAB 3	ANALISA DAMPAK KONTESTASI BANTUAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DAN CHINA TERHADAP KONSTELASI POLITIK DI KAWASAN PASIFIK SELATAN 3.1 Pembentukan Pola Aliansi 3.2 Polarisasi di Pasifik Selatan
BAB 4	PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran